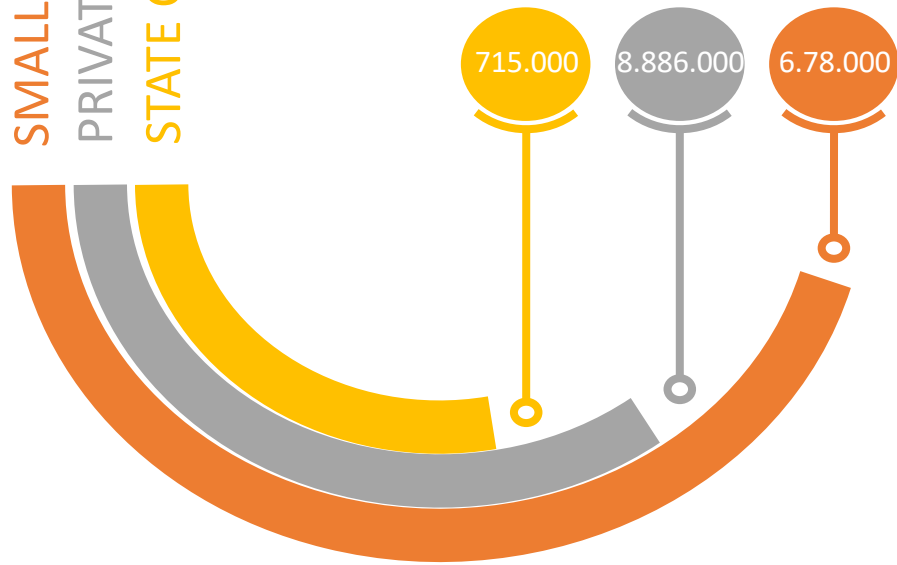


Program PSR, belum optimal....

Mansuetus Darto

SMALLHOLDERS
PRIVATE COMPANY
STATE COMPANY



70%

INDEPENDENT SMALLHOLDERS



30%

PLASMA SMALLHOLDERS



Petani yang memiliki Legalitas lahan



Asal Usul Lahan



Latar belakang

- Pasal 93 ayat 3 UU Perkebunan: “frasa pembiayaan usaha perkebunan” **bukan** Pembiayaan Usaha Industry
- Pembiayaan Usaha Perkebunan ditujukan untuk : Pengembangan SDM, Penelitian dan pengembangan, Promosi Perkebunan, Peremajaan dan dukungan sarana prasarana perkebunan.
- Meningkatkan Kesejahteraan petani melalui pendekatan peningkatan produktivitas dan pembangunan sawit berkelanjutan.

DAMPAK PUNGUTAN SAWIT KE HARGA TBS



RUMUS TBS

$$K\% (\text{Harga CPO} \times R \text{ is} + \text{Harga is} \times R \text{ is})$$

	HARGA SAWIT PLUS POTONGAN BPDP	HARGA TBS TANPA POTONGAN BPDP
Indeks K	83,63 %	83,63
Harga CPO	5,751	6,461
Rendemen	0,2103 %	0,2103
Harga IS	4,726	4,726
Rendemen IS	0,0465 %	0,0465
	1,209	1,358
HASIL	0,219	0,219
	1,429	1,578
Indek K % X Hasil	0,83	0,83
Harga TBS Petani	<u>1186</u>	<u>1310</u>

Besaran pungutan sawit BPDP-KS bagi petani sawit sebesar **Rp. 124/kg**

NOTE : Harga CPO int - Potongan BPDP - cost produksi/transportasi (25 dolar)/1000
 $480 - 50 - 25 / 1000 \times \text{Kurs Rupiah} = 5,751$



Harga CPO	480 ton
BPDP	50
Cost Produksi+	25
	<u>405</u>



Realisasi Alokasi Dana BPDPKS

Jumlah dana yang dihimpun BPDP-KS sejak tahun 2015-2019 senilai Rp. 47, 28 triliun. Alokasi penggunaan Dana BPDP-KS Tahun 2019 tercatat total penggunaan dana dari pungutan ekspor sawit dari tahun 2015 hingga 2019 berjumlah **Rp. 33,6 Triliun**

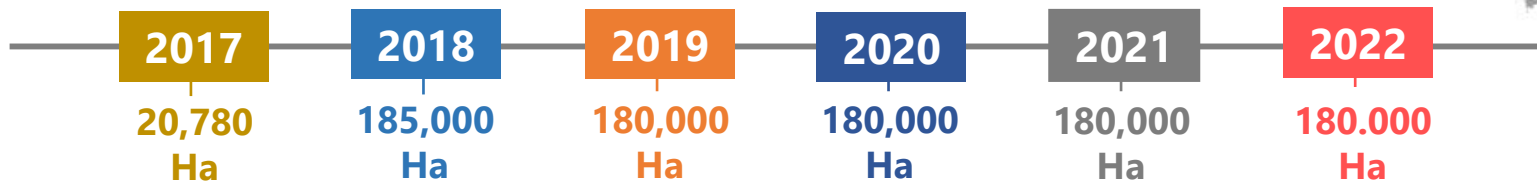


Dengan situasi covid 19, negara menyuntik dana biodiesel sebesar Rp. 2,7 Triliun dan sedang meminta insentif lebih lanjut

REKAP PENYALURAN DANA PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT TAHUN 2016 - 2020

TAHUN	REKOMENDASI TEKNIS	PEKEBUN	LUAS LAHAN (Ha)	PENYALURAN DANA PSR (Rp)	REALISASI PENCAIRAN DANA (Rp)	PERSENTASE
2016	1	116	254	6.350.000.000	SUBSIDI BUNGA	
2017	6	1,409	2,933	73.316.035.000	73.130.219.559	99,75%
2018	46	5,654	12,611	315.031.250.000	290.602.589.244	92,25%
2019	485	39,994	91,071	2.276.775.485.000	1.169.789.034.097	51,38%
2020	226	15,344	35,617	917.868.959.500	120.990.771.289	13,18%
Total	764	62,517	142,485	3.589.341.729.500	1.654.512.614.189	46,10%

TARGET PSR 2020-2022



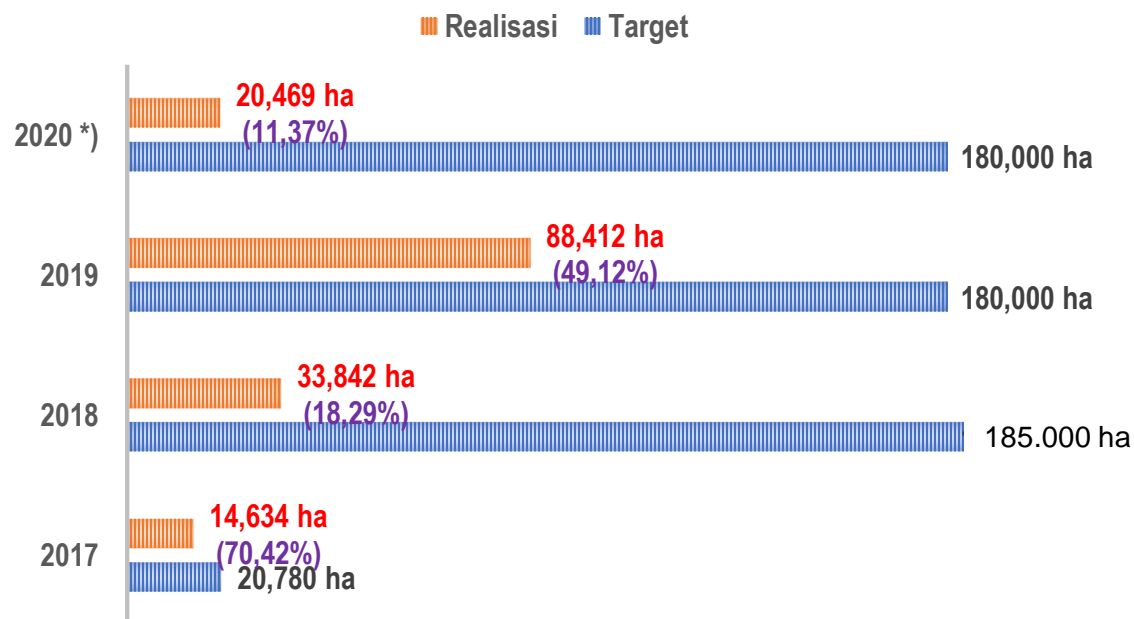
Typology petani kelapa sawit (Perlakuan jangan seragam/ Aturan jangan seragam)

Model lahan yang digunakan	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan lahan APL• Menggunakan Kawasan• Tidak bersertifikat lahan ataupun STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)
Model sumber pendapatan :	<ul style="list-style-type: none">• Petani kelapa sawit Sebagian memiliki sumber pendapatan lain dari kebun lain yang masih produktif.• Petani kelapa sawit Sebagian tidak memiliki sumber pendapatan lain, hanya dari kelapa sawit.
Model petani kelapa sawit	<ul style="list-style-type: none">• mayoritas tinggal di desa dengan rata-rata penguasaan kurang dari 5 ha.• Sebagian tinggal di kota dimana perkebunannya di Kelola oleh buruh/karyawan.
Model pengelolaan kebun petani swadaya :	<ul style="list-style-type: none">• Tidak mengelola dalam hamparan kebun melainkan berpencar-pencar. Tidak ada keseragaman tahun tanam-nya dengan bervariasi.• Tidak berorganisasi dalam kelembagaan pekebun.• Tidak terhubung langsung dengan pabrik kelapa sawit.

REALISASI REKOMENDASI TEKNIS DAN TRANSFER DANA BPDPKS 2017-2020



Target PSR dan Realisasi Rekomtek



*) Data sampai dengan 29 April 2020

Sumber : Dirjenbun

2017-2020

- Realisasi rekomtek: **157.358 Ha**
- Realisasi transfer dana BPDPKS: **Rp 2,7 triliun**

Tahun	Target (ha)	Prov dan Kab	Kop/ Gapoktan/ Poktan (unit)	Realisasi Rekomtek		Transfer Dana dari BPDPKS	
				(Ha)	(%)	Ha	Rp
2017	20.780	7 Prov / 20 Kab	40	14.634	70,42	13.390	334.738.802.500
2018	185.000	16 Prov / 45 Kab	176	33.842	18,29	34.616	865.403.352.500
2019	180.000	20 Prov / 79 Kab	503	88.412	49,12	58.271	1.456.776.217.500
2020	180.000	21 Prov/ 106 Kab	119	20.469	11,37	1.846	45.415.089.263
Total			838	157.358		108.123	2.702.333.461.763

*) Data sampai dengan 29 April 2020

Sumber : Kementan dan BPDPKS (Aplikasi PSR Online)

Masalah-masalah umum

- Tidak tersedia data secara utuh (database petani) baik di tingkat kabupaten maupun nasional
- Dirjenbun juga tidak memiliki cukup dana dan begitupun hingga provinsi dan kabupaten untuk melakukan sosialisasi hingga kelompok
- Petani swadaya tidak memiliki kelembagaan tani dan petani seolah-olah dipaksa membentuk kelembagaan tani hanya untuk memenuhi syarat PSR bukan tujuan untuk kemandirian tani.
- Membuat peta kebun dan penyediaan titik kordinat.
- Pembuatan STDB perlu ada pendataan sesuai dengan format STDB yang telah disusun oleh dirjenbun dengan disertai titik kordinat. Sementara ini juga membutuhkan biaya.
- Program ini belum maksimal menyentuh petani swadaya dan hanya eks PIR plasma.
- Usia petani rata-rata sudah tua, dan tambahan kredit dari bank perlu di tinjau kembali.

Resiko

- Program PSR tidak bisa menjangkau petani swadaya dan para petani tetap akan melakukan peremajaan secara mandiri dengan system budidaya sendiri dan penggunaan bibit yang bisa dijangkau oleh para petani
- Resikonya adalah ; mimpi peningkatan produktivitas dari kebun rakyat tidak akan tercapai, termasuk mendukung Impres No 6 Tahun 2019 tdak akan tercapai.

Rekomendasi

- Libatkan pendamping dari organisasi petani dimana asosiasi memiliki petani yang melakukan replanting
- Syarat perlu khususnya lahan sawit tidak dalam Kawasan hutan.
- Syarat terkait dengan kelembagaan untuk petani swadaya di hilangkan khususnya untuk PSR dengan catatan;
 - Peremajaan dengan pendekatan individu harus dilakukan untuk menyesuaikan karakteristik petani yang berbeda-beda. Data bisa disediakan oleh pabrik, pemda atau asosiasi petani.
 - Pendampingan oleh dinas teknis kabupaten selama PSR untuk memastikan aspek budidaya.
 - Terdapat mitra pabrik pengelolaan sebagai jaminan pemasaran pasca produksi
 - Kerjasama dengan Lembaga pembibitan untuk penyediaan bibit.
 - Insentif melalui upah perawatan selama tanaman belum menghasilkan hingga Tanaman menghasilkan khusus untuk petani yang tidak memiliki sumber penghasilan lain.

Roadmap peremajaan



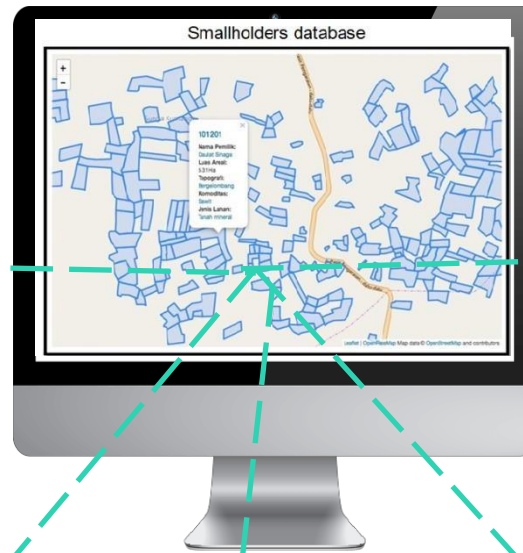
Kelembagaan tani yang kuat dan legal



TBS yang diterima pabrik sawit; legal



Perusahaan memiliki data petani yang akan replanting



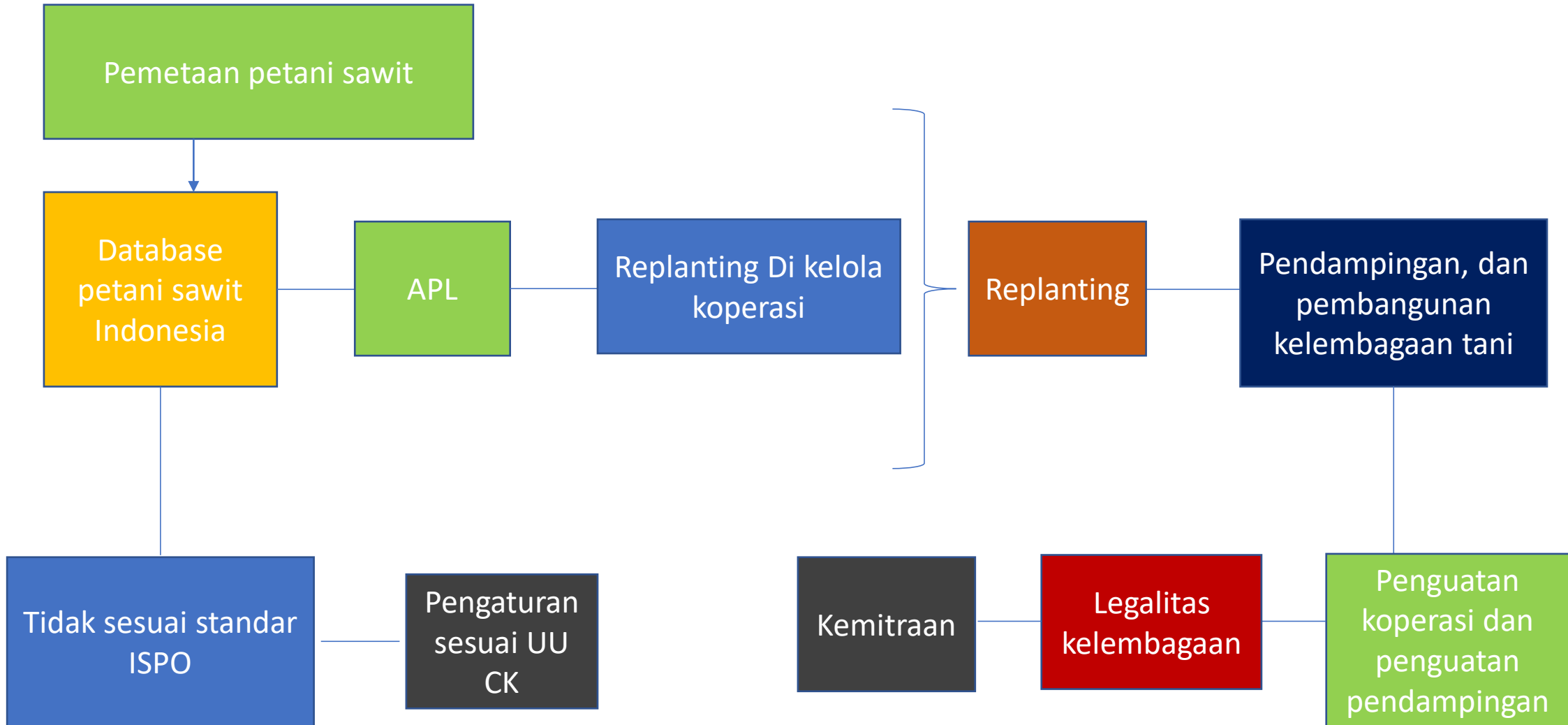
Legality support By local government



Memiliki Kelembagaan Petani yang siap bermitra dengan perusahaan

Model Akhir

Skema-alur PSR seharusnya.....



Usulan POPSI terhadap penataan dana BPDP-KS terkait PSR

- Penambahan dana PSR dari 30 juta per hectare menjadi 50 juta per hectare.
- Surveyor yang sudah ditentukan tidak efektif bekerja di lapangan dan cenderung tumpang tindih dengan lokasi target kabupaten. Selain itu, sosialisasi ke lapangan/ kelompok tidak pernah melibatkan dinas.
 - Lembaga surveyor harus bernaung di bawah kabupaten.
- Pengadaan dana pra-kondisi PSR untuk petani swadaya murni. Catatan; petani swadaya menumpang di kelembagaan tani yang sudah terbentuk.
- Kelembagaan tani sebagai point penting untuk pelaksanaan PSR, tapi dana BPDP-KS tidak mendukung pembentukan kelembagaan tani.
- Pembangunan dan fasilitasi Unit pengolahan Kelapa sawit;
- Audit bagi Lembaga Surveyor dan pelibatan KPK dalam pengawasan

Perlu dukungan dana Pra-Kondisi

Dukungan dana Pra-Kondisi	Dukungan dana Pelaksanaan
Sosialisasi	Pemberkasan
Pendataan	Pembuatan rekening
Pembangunan kelembagaan tani dan legalitas kelembagaan	Pembuatan STDB
Penyediaan fasilitator untuk pendamping	

Penataan Kelembagaan BPDP-KS dan Dana Sawit

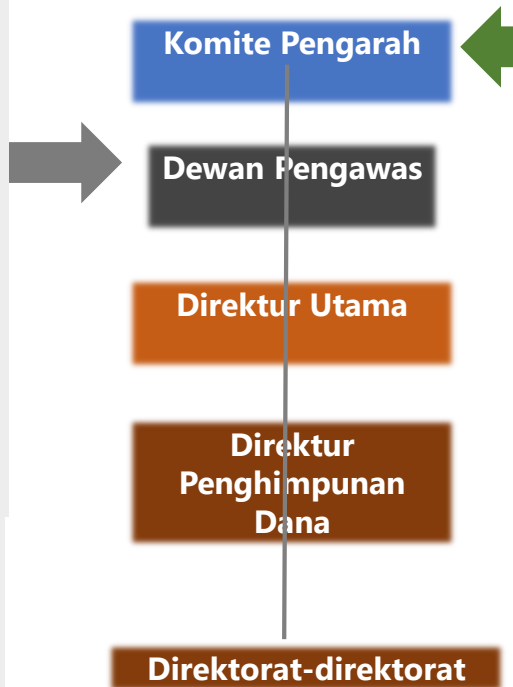
- 40 ribu dukungan dari publik untuk petisi di change.org untuk penataan ulang BPDP-KS.
- Transparansi dana BPDP-KS
- Direktorat Petani di butuhkan di BPDP-KS
- Dewan pengawas dan komite pengarah harus bebas kepentingan konglomerats dan pengusaha sawit --- Sebagai Kunci akuntabilitas BPDP-KS
- Desentralisasi pengelolaan dana ke Kabupaten atau provinsi bukan di Jakarta.
- **Surveyor PSR : Melakukan pemberkasan, verifikasi, pengusulan rekomendasi teknis kepada dirjenbun, pengawasan, pengawasan, monitoring dan evaluasi PSR.**
- **Pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi di lakukan oleh Menteri dan BPDP-KS dan dilakukan secara berjenjang (kabupaten, provinsi dan dirjenbun).**

Mengapa terjadi ketidakadilan alokasi dana ?

MELIHAT KE DALAM BADAN DANA SAWIT (BPDP-KS)

- Dipilih Kemenko Perekonomian
- Dipilih menteri Pertanian
- Dipilih Menteri Perindustrian
- Dipilih menteri Perdagangan
- Dipilih menteri ESDM
- Dipilih menteri Keuangan
- Profesional
- Profesional
- Perwakilan pengusaha

Dewan pengawas memiliki peran untuk melakukan pengawasan



- Menko Perekonomian
- Menteri Pertanian
- Menteri Keuangan
- Menteri Perindustrian
- Menteri Perdagangan
- Menteri ESDM
- Menteri BUMN
- Menteri PPN/ Kepala Bappenas
- Profesional
- Profesional
- Profesional

Tugas komite pengarah adalah menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan pengelolaan dana.

PMK 113/PMK.01/2015

Dan PMK 259/2020.